

# Politik Pembangunan Denpasar *Smart City* Oleh Walikota Denpasar

Putu Editya Dharmanggara<sup>1</sup>, Piers Andreas Noak<sup>2</sup>, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : , [iamedityaaa@gmail.com](mailto:iamedityaaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [piersandreasnoak@unud.ac.id](mailto:piersandreasnoak@unud.ac.id)<sup>2</sup>, [mahaswari@unud.ac.id](mailto:mahaswari@unud.ac.id)<sup>3</sup>

## Abstract

*This In the current era of globalization, fast, precise, and accurate information services are needed. Pro Denpasar application is the application of the smart city concept by utilizing technology and communication to realize better public services. This study tries to describe how the politic of Denpasar Smart City development by the Mayor of Denpasar as a development political actor develops Denpasar Smart City. The theory used to explain the problem is the theory of development politics and the theory of development political actors. This research uses descriptive research and qualitative research methods, namely by using in-depth interview with relevant government agencies, the community and literature studies to explore the development of Denpasar Smart City and determined political impact of the development of the Mayor of Denpasar on the community.*

**Keywords :** Denpasar City, Political Development. Smart City.

## 1. PENDAHULUAN

Kota Denpasar yang merupakan ibu kota Provinsi Bali yang sangat gencar berproses menuju kota pintar (*smart city*) berbasis elektronik yang dikenal dengan istilah *E-Government*. Dilansir dalam (DenpasarKota.go.id, 2019) Dalam forum PBB Walikota Denpasar I B Rai Dharmawijaya Mantra, menjelaskan tentang filosofi budaya Tri Hita Karana yang menjadi dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Denpasar. Di samping itu, Denpasar juga dinilai mampu menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis dengan tetap memperkuat budaya dan menyambut hangat hadirnya teknologi

di era 4.0 ini. Tri Hita Karana ini sebagai pemandu kami untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Kota Denpasar yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Kota Denpasar sedang serius berbenah menuju *smart city* sebagai jawaban atas tantangan global, terutama dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sejak tahun 2016 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah Kota Denpasar resmi menerapkan layanan sistem terpadu. Sistem pelayanan ini dapat dengan mudah diakses masyarakat karena telah mendukung akses via teknologi *mobile*.

Dilansir dari halaman (Surabaya.go.id, 2018) Banyak kota-kota di belahan dunia yang menerapkan konsep *Smart City*, contohnya seperti di kota Tokyo, Jepang. Kota Tokyo mendapat predikat sebagai kota dengan penerapan konsep Smart City terbaik nomor satu di dunia. Bahkan bukan hanya Tokyo yang mendapat predikat dengan kota konsep *Smart City* terbaik, melainkan kota Osaka yang menjadi predikat sepuluh dalam penerapan konsep *Smart City* terbaik di dunia. Di Indonesia sendiri Kota Surabaya menjadi salah satu Kota di Indonesia pernah memenangkan predikat *Smart City Award* 2011 versi majalah Warta Ekonomi.

Data (BPS Kota Denpasar, 2020) perkembangan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2010 yang berjumlah 788.589 jiwa. Lalu pada tahun 2015 penduduk di Kota Denpasar meningkat 880.600 jiwa, disini terlihat selama 5 tahun pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar sebesar 1,07% Dengan demikian Denpasar merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Bali. Dengan jumlah penduduk yang besar tentu pemerintah harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat untuk masyarakat Kota Denpasar.

Demi mensukseskan sebuah kota menjadi kota cerdas (*Smart City*) Sebuah media sangat dibutuhkan Masyarakat di Kota Denpasar untuk menyampaikan aspirasi dengan mudah dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Media tersebut juga perlu memiliki

fungsi-fungsi yang tepat guna dan tepat sasaran agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah maupun dinas yang tepat, sehingga segala masukan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan baik. Dalam sejarah pelayanan administrasi publik, pelayanan publik merupakan sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Dwiyanto, 2017:14).

Pemerintah Kota Denpasar melalui ditenerapkannya teknologi dan informasi berupaya mengembangkan sebuah sistem pengaduan bagi masyarakat dalam pelayanan publik berbasis elektronik (online) yang terintegrasi dengan jaringan SKPD melalui Pengaduan Rakyat Online (PRO) Denpasar. Dikembangkannya pelayanan publik berbasis online ini hadir dengan istilah Pengaduan Rakyat Online (PRO) Denpasar bertujuan untuk mengkoordinir dan menyeragamkan penanganan pengaduan masyarakat di Kota Denpasar.

Dilansir pada (PenaBali.com, 2019) Pada tahun 2013 hadir sebuah aplikasi PRO Denpasar yang memudahkan masyarakat untuk dapat melaporkan keluhan di lapangan secara langsung dan kapanpun kepada pemerintah dilengkapi bukti yang kuat seperti foto, dokumen dan lokasi kejadian. Laporan masyarakat dapat dipantau dan direspon secara langsung oleh pemerintah dan petugas di lapangan untuk ditindaklanjuti. Dengan aplikasi ini, pemerintah juga dapat memonitoring dan menganalisa laporan masyarakat dan respon cepat petugas lapangan secara *real*

*time*. Bagi masyarakat, aplikasi ini dapat mengakses informasi yang disajikan oleh pemerintah lebih mudah, cepat dan akurat..

Pada Aplikasi PRO Denpasar yakni kategori kelas *interact*, dikarenakan surdah terciptanya komunikasi dan hubungan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik) menyediakan sarana pengaduan berbasis aplikasi dengan sistem satu pintu yang terintegrasi dengan jajaran OPDD Kota Denpasar sehingga masyarakat dapat melakukan interaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian *data base* bersama.

PRO Denpasar diharapkan menjadi super apps-nya Kota Denpasar. Sampai saat ini, fitur-fitur yang terdapat pada *mobile application* PRO Denpasar selalu diperbaharui dan dengan tampilan yang lebih user friendly atau dapat diterima oleh kaum *milenial*. Misalnya aplikasi pelayanan ini di dalamnya juga ditambahkan fitur berupa *city tour*. Dengan adanya fitur ini, aplikasi PRO Denpasar tidak hanya digunakan oleh warga Denpasar sendiri, melainkan juga wisatawan, baik itu lokal, nasional dan mancanegara. Selain menghadirkan berbagai fitur terbaru, Diskominfo juga menggandeng berbagai pihak dalam pengembangan aplikasi PRO Denpasar. (BaliBerkarya.com, 2019).

Dari latar belakang tersebut, peneliti menggunakan teori politik pembangunan dan teori aktor politik pembangunan oleh Dr. Warjio untuk membedah permasalahan yang terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Politik Pembangunan Denpasar *Smart City* Oleh Walikota Denpasar.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Teori Politik Pembangunan

Pembangunan dihadirkan dengan berbagai latar belakang dan kepentingannya. Kehadiran aktor politik pembangunan menjadi bagian sentral dari politik pembangunan. Dalam sebuah pembangunan, negara adalah salah satu aktor politik pembangunan. Negara sebagai aktor politik pembangunan memiliki kekuasaan untuk melakukan intervensi dalam pembangunan. Untuk menjalankan langkah-langkah tersebut negara sebagai aktor pembangunan biasanya melakukan dengan menggerakkan apa yang disebut birokrasi (Warjio, 2016:220).

Warjio (2017:87) menjelaskan Politik pembangunan adalah satu terminologi yang merupakan gabungan antara konsep politik dan pembangunan. Konsep politik selama ini banyak diartikan sebagai perebutan serta memanfaatkan kekuasaan. Menurut para pakar, inti dari politik adalah distribusi kekuasaan. Morgenthau mengistilahkan asas politik dengan *the struggle for power*, perjuangan

untuk mendapatkan kekuasaan. Namun demikian dari pengertian diatas, politik sesungguhnya merupakan cara dan strategi untuk meraih kekuasaan dan dengan itu ia dapat mengimplementasikan ide, gagasan atau ideologi perjuangan baik secara individu, kelompok atau negara. Sama dengan konsep politik, pembangunan juga merupakan konsep yang hari ini masih diperdebatkan dan menuai banyak kritik.

Teori-teori pembangunan pada umumnya berhubungan dengan pengalaman negara maju dengan menitikberatkan pada kemajuan dan perubahan masyarakat yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya permasalahan kemiskinan. Proyek pembangunan yang dilakukan oleh Negara maju atau donor, biasanya ditransformasikan kepada negara berkembang. Karena itulah perspektif pembangunan tradisional di negara-negara yang kurang berkembang biasanya mengasumsikan kemungkinan pembangunan di setiap tempat, modal dan teknologi bisa dipakai dan dapat disaring dari pengalaman negara maju untuk kurang berkembang. Penyebaran kapitalisme dipercayai, akan memecahkan masalah yang terjadi di setiap negara. Dimana dari hal tersebut disimpulkan inti dari teori pembangunanyaitu persoalan perubahan sosial.

Menurut Warjio (2017:70-71) peran pemerintah disini sangat penting menjadi

sebuah subjek utama pembangunan yakni memperlakukan rakyat sebagai objek, recipient atau penerima. Pemahaman yang demikian tentang pembangunan memberikan satu kesimpulan bahwa pembangunan sangat terkait erat dengan proses dan kepentingann politik lembaga-lembaga internasional ataupun kepentingan negara. Pembangunan juga merupakan buah dari proses ataupun kepentingan elit pemerintah maupun kelompok kepentingan dalam satu negara.

Trategi pembangunan pada dasarnya adalah cara atau jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula berdasarkan platform yang di buat. Karena itu strategi pembangunan yang baik tentu akan menghasilkan pencapaian tujuan yang diinginkan secara tepat, efisien, dan efektif. Strategi pembangunan seharusnya disesuaikan dengan kondisi, potensi yang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi serta sumber daya yang tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat dibidang ekonomi, perbedaan cara pandang ataupun perspektif yang hendak dicapai inilah yang mengakibatkan beragam makna pembangunan, dengan kata lain definisi akan mempengaruhi tujuan. Todaro (2016) menjelaskan bahwa pembangunan adalah sebuah proses multidimensional

yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi, pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Warjio (2017:106-108) mendefinisikan politik pembangunan sebagai satu usaha atau satu aktivitas baik yang dilakukan oleh para aktor seperti individu atau kelompok/negara baik lokal maupun internasional, secara struktur atau tidak dalam pembangunan dalam proses politik yang dilakukan untuk melegitimasi program atau tujuan pembangunan agar pembangunan itu dapat memperkuat atau mendapat dukungan sehingga kekuasaan dapat terus dipegang (berkelanjutan) dengan cara atau strategi-strategi tertentu. Politik pembangunan merupakan sebuah arena yang didalamnya terdapat banyak aktor-aktor. Aktor inilah yang mengisi ruang atau arena dari politik pembangunan. Aktor pembangunan dengan kekuasaan yang dimilikinya bisa secara lembut atau dengan cara paksa menghasilkan beberapa proyeksi-proyeksi pembangunan, mengintervensi dan memengaruhi proses pembangunan. Legalisasi identitas kekuasaan menjadi ciri penting keterlibatan aktor politik pembangunan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif deskriptif

menggunakan data primer dan data sekunder, untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bentuk pembangunan politik Walikota Denpasar melalui aplikasi PRO Denpasar harus memuat data-data inti dan pendukung yang rinci.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti mempertimbangkan informan-informan yang dipilih menguasai dan paham serta mengetahui informasi tentang bentuk pembangunan politik Walikota Denpasar melalui aplikasi PRO Denpasar harus memuat data-data inti dan pendukung yang rinci.

## 4. PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Pemerintahan Kota Denpasar

Pemerintah Kota Denpasar saat ini memiliki situs web yang berisi informasi tentang Kota Denpasar dan pemerintahannya. Ciri khas kota cerdas adalah kota yang telah memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat saat ini menggunakan teknologi terkini, telah membangun infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat yang tinggal di kota (Sudaryono, 2014). Pelayanan efektif yang diberikan pemerintah tidak hanya yang bersifat umum (sosial) seperti pendidikan, kesehatan, hukum tetapi juga pelayanan efektif iklim birokrasi (politik

pemerintahan) yang juga diubah seiring perubahan zaman yang semakin global dan modern.

Dilansir (DenpasarKota.go.id) Kota Denpasar sebagai ibukota dari Provinsi Bali tentu banyak dikenali oleh masyarakat. Selain itu Kota Denpasar merupakan salah satu destinasi wisata dunia. Namun banyak yang belum mengetahui bagaimana sejarahnya terbentuknya Kota Denpasar hingga seperti sekarang.

Nama Denpasar sendiri terdiri dari dua kata yaitu "den" yang berarti utara dan "pasar" yang berarti pasar. Nama ini diberikan pada taman tersebut mengingat lokasinya yang terletak di utara pasar. Kini taman tersebut menjadi Jaya Sabha, rumah jabatan untuk Gubernur Bali. Secara administratif, Kota Denpasar diresmikan sebagai sebuah kota pada tahun 1788. Pembentukan kota ini mengalami proses yang panjang, bahkan sejak Pulau Bali masih ditinggali oleh kerajaan-kerajaan.

### **Model dan Konsep Denpasar *Smart City***

Implementasi konsep *'Smart City'* saat ini dapat kita lihat di beberapa instansi pemerintah Kota Denpasar. Sebagai contoh misalnya Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) sudah menerapkan sebuah layanan masyarakat yang online dan berbasis digital yang bernama *'Damamaya Denpasar Cyber Monitoring'*. Fungsi *Damamaya Cyber Monitoring* sebagai sebuah pusat kontrol seluruh OPD Kota Denpasar. Keunggulan program digital ini

adalah kemudahan bagi Pemkot Denpasar dalam memantau, mengawasi, dan menindaklanjuti peristiwa-peristiwa seperti bencana (telepon gawat darurat 112), pemantauan terhadap banjir, ATCS, Pro Denpasar, Geografik Informasi Sistem dan layanan administratif di aplikasi *e-Sewaka Dharma*. Selain itu Diskominfo Denpasar memiliki juga program *'Safe City'* yaitu program yang ditujukan untuk memantau kondisi riil kota Denpasar dalam menanggulangi kebakaran, konflik, kecelakaan, kriminalitas, banjir hingga gempa bumi. Disamping memaksimalkan pelayanan publik secara ekstern seperti *Damamaya Denpasar Cyber Monitoring*, Diskominfo juga memiliki penilaian kinerja pegawai secara online yang disebut *e-Kinerja dan e-Planning*. Sehingga kinerja aparatur sipil negara tingkat bawah atau biasa bisa dipantau dan diberikan *'reward'* apabila bekerja sesuai target, optimal dan profesional. Selain itu Diskominfo Kota Denpasar juga telah memiliki aplikasi *e-Magazine* yang dirancang untuk menyampaikan informasi seputar berita terkini di kota Denpasar.

BPBD Kota Denpasar turut serta melakukan inovasi dan terobosan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui program *Damapancana* (Denpasar Mantap Penanggulangan Bencana) dan *Damakesmas* (Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat) yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Program Damapancana ditujukan untuk memantau dan menindaklanjuti masalah kebencanaan di Denpasar. Masalah bencana bisa dimonitor dari ruang operasional (Pusdalops) dan secara cepat bisa diselesaikan oleh tim lapangan BPBD. Program Damapancana ini sendiri sangat mengandalkann teknologi, seperti memasang beberapa CCTV di lampu lalu lintas untuk memantau kemacetan, kecelakaan, kriminalitas. BPBD Denpasar juga bekerjasama dengan Diskominfo terkait pengaduan masyarakat mengenai masalah kebakaran maupun banjir.

Beberapa contoh diatas telah membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Denpasar sudah berbasis digital dan online. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional, tetapi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu teknologi informasi. Pemkot Denpasar juga mengambil wadah seperti media sosial (medsos) untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program yang dimiliki. Konsep '*Smart City*' dalam membawa perubahan di ditengah masyarakat tidak hanya berbicara mengenai kecanggihann teknologi, tetapi lebihh dari itu adalahh kinerja, profesionalitas aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat berjalan optimal.

## **Hasil Temuan dan Analisa Perkembangan Politik Pembangunan Kota Denpasar**

Dalam perjalanannya politik pembangunan di Kota Denpasar sudah mengalami modernisasi saat pemerintahan Walikota Denpasar bapak Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menjabat pada tahun 2008 hingga 2020. Gebrakan banyak dilakukan saat mengembangkan kota pintar di Denpasar. Masa kepemimpinan Rai Mantra ditandai dengan berbagai macam proyek penataan dan pembangunan kota, terutama pengembangan Denpasar *Smart City* yang telah dicanangkan dalam kampanye beliau, hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Denpasar (RJPMD) yang telah disusun tahun 2005-2010.

Selain itu, Rai Mantra pada periode 2010—2015 Kota Denpasard dicanangkan menjadi Kota Kreatif. Untuk menguatkan fondasi Denpasar sebagai Kota Kreatif pada tahun 2010-2015, dibutuhkan aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggul secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan (*sustainable*). Penguatan fondasi ini selaras dengan Purradhipa Bhara Bhawana, yakni kewajiban pemerintah meningkatkan kemakmuran rakyat. Saat menjabat sebagai Walikota, Rai Mantra, secara tegas menyatakan konsisten untuk mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur Bali periode 2018 - 2023, hal tersebut tentu mengganggu jalannya Pembangunan yang telah ia canangkan di Denpasar, pada saat

itu posisi kepemimpinan dilanjutkan sementara oleh wakilnya yaitu bapak Jayanegara.

### **Strategi Pemerintahan Kota Denpasar Mengembangkan Konsep Denpasar *Smart City***

Pengembangan Kota Denpasar sebagai *Smart City* adalah kegiatan pemerintah Kota Denpasar yang memiliki tujuan memberikan layanan yang semaksimal mungkin bagi penduduknya. Walikota Denpasar dan Wakil Walikota Denpasar memiliki sebuah inovasi kebijakan yang sejak kampanye telah disuarakan yaitu mengembangkan Denpasar sebagai kota *Smart City*. Konsep *Smart City* pada dasarnya telah digagas dan mulai diterapkann di negara maju. Fenomena ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi internet yang mulai digunakan dalam banyak aspek kehidupan. Pada intinya konsep *Smart City* atau Kota Pintar ini adalah penggunaan data digital dan sistem informasi teknologi dalam skala besar untuk perencanaan dan manajemen perkotaan.

Walikota dan Wakil Walikota Denpasar memberikan tugas kepada Diskominfo dalam menerapkan konsep *Smart City*. Sebagian besar instansi pemerintahan Kota Denpasar yang terlibat dalam pengembangan konsep *Smart City* yang digagas Pemkot Denpasar. Salah satu wujud yang telah

diterapkan dalam konsep *Smart City* adalah program “PRO Denpasar” yaitu sebuah aplikasi yang berbasis online. Aplikasi ini merupakan aplikasi laporan keluhan serta penyerapan aspirasi masyarakat berbasis online. Aplikasi PRO Denpasar merupakan sebuah implementasi serta bagian dan sebuah strategi keseriusan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengembangkan Kota Denpasar sebagai Kota Pintar (*Smart City*).

Namun sesuai dengan konsep *Smart City* bahwasannya konsep ini tidak hanya mendasar pada pembangunan dan pengelolaan kota namun menyangkut dimensi institusional. Pro Denpasar sebagai salah satu bagian dari program pengembangan konsep *Smart City* bila dikaji kembali melalui dimensi tersebut maka dilihat dari segi Ekonomi Pintar (*Smart Economy*), Masyarakat Pintar (*Smart People*), Pemerintahan Pintar (*Smart Governance*), Mobilitas Pintar (*Smart Mobility*), Lingkungan Pintar (*Smart Environment*) Kehidupan Pintar (*Smart Living*).

Berdasarkan analisis terhadap aplikasi Pro Denpasar, Aplikasi tersebut merupakan awal dari pengembangan konsep *Smart City* di Kota Denpasar. Enam dimensi konsep *Smart City* hanya tiga dimensi yang selaras dengan konsep *Smart City* yaitu dimensi masyarakat pintar, pemerintah pintar dan mobilitas pintar. Maka dari itu perlu pengembangan program-program



yang mendukung dimensi lain selain dari pada aplikasi Pro Denpasar.

### **Analisa Hasil Temuan**

#### **Analisis Teori Politik Pembangunan Terhadap Pengembangan Denpasar Sebagai Kota *Smart City***

Terdapat 5 variabel pendekatan teori politik pembangunan. Adapun variabel dalam teori politik pembangunan Warjio yaitu: Adanya aktor-aktor pembangunan, Adanya kekuasaan, Adanya sistem, Adanya ideology, Adanya intervensi asing.

Penulis hanya menggunakan 3 (tiga) variabel untuk menganalisis kebijakannya ini yaitu adanya aktor-aktor pembangunan, adanya kekuasaan, dan adanya sistem.

#### **Adanya Aktor – Aktor Pembangunan**

Aktor pembangunan merupakan syarat mutlak dari politik pembangunan, dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Denpasar beserta aparat pemerintah bersinergi sebagai bagian dari aktor politik pembangunan. Walikota, Wakil Walikota dan aparat pemerintah.

Walikota dan Wakil Walikota Denpasar memiliki kuasa terhadap tata kelola Pemerintahan Kota Denpasar, kekuasaan merupakan syarat penting dalam sebuah pembangunan. Walikota dan Wakil Walikota terlibat terhadap semua kebijakan dalam tata kelola Pemerintahan Kota Denpasar termasuk dalam program penerapan *Smart City* di kota Denpasar karena tanpa

kekuasaan tentu sulit bagi Walikota Wakil Walikota untuk mengintervensi pembangunan di Kota Denpasar, variabel kekuasaan dalam politik pembangunan menyebutkan bahwa tanpa kekuasaan sulit bagi individu, kelompok atau negara mengintervensi pembangunan dan dengan kekuasaan tujuan pembangunan dapat dilaksanakan. Dalam mewujudkan politik pembangunannya, Walikota dan Wakil Walikota Denpasar menggunakannya hak diskresi sebagai pejabat eksekutif sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 6 ayat 2 huruf E menyatakan bahwa menggunakan Diskresi sesuai dengantujuannya.

Hal ini selaras dengan variabel teori politik pembangunan Warjio yang mengatakan bahwa kekuasaan adalah apa yang dimiliki oleh aktor pembangunan untuk merealisasikan tujuan dari pembangunan itu baik dalam bentuk *hard power* dan *soft power*.

#### **Adanya Kekuasaan**

Adanya kekuasaan menjadi syarat penting dalam pembangunan. Tanpa kekuasaan sulit Pemimpin mengintervensi pembangunan. Dengan kekuasaan tujuan pembangunan dapat dilaksanakan. Kekuasaan adalah apa yang telah dimiliki oleh aktor pembangunan dalam merealisasikan tujuan dari pembangunan itu baik dalam bentuk *hard power* dan *soft power*.

(Warjio 141: 2016). Dalam kajian politik, negara adalah aktor yang terbentuk secara sistemik sebagai sebuah institusi dengan kekuasaan yang besar. Sebagai sebuah institusi dalam Negara terdapat banyak substansi yang bergerak dengan tugasnya dan saling terhubung (Warjio, 206:2016).

Seperti yang terjadi di Denpasar yang dimana Walikota yang memimpin Denpasar periode 2008-2020 yaitu Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menggunakan kuasanya penuh atas pengembangan Denpasar *Smart City* ini, terbukti melalui perkembangan yang terjadi di Kota Denpasar beliau memberikan arahan serta mengkoordinir langsung kepada Dinas Kota Denpasar selaku Dinas yang bertanggung jawab atas pengembangan Denpasar *Smart City*.

Terhusus untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar beliau memberikan tugas khusus kepada Diskominfo untuk menciptakan sebuah aplikasi yang dapat diakses masyarakat dalam urusan birokrasi maupun melaporkan keluhan serta masukan dan saran yang terjadi di Kota Denpasar. Tahun 2013 terciptalah aplikasi Pro Denpasar walaupun awal adanya Pro Denpasar melalui website, hingga tahun 2016 lahirlah aplikasi Pro Denpasar yang dimana disambut baik oleh masyarakat ini semua tidak lepas dari tangan dingin Bapak Rai Mantra selaku Walikota pada saat itu.

Kekuasaan dalam politik pembangunan sebagai dorongan aktor-aktor pembangunan untuk mengendalikan orang atau kelompok lainnya dalam program atau rancangan pembangunan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dari pembangunannya itu dapat tercapai (Warjio, 144:2016). Hal ini terbukti dengan Proses pengembangan Denpasar *Smart City* tidak lepas dari adanya peran pemerintah yang bekerja keras dalam menyelesaikan persoalan – persoalan di Kota Denpasar hingga hadirnya sebuah aplikasi Pro Denpasar yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat Kota Denpasar.

#### **Adanya Sistem**

Proses mengembangkan Denpasar *Smart City* memiliki sistem yang terencana dan terstruktur, hal tersebut terlihat bahwa bagaimana Walikota dan Wakil Walikota menginstruksikan pendirian aplikasi Pro Denpasar lewat Peraturan Walikota (Perwali) no 45 Tahun 2013. Pengembangan Kota Denpasar sebagai kota *Smart City* merupakan wujud implementasi dari Peraturan Presiden (Pepres) No. 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pelayanan publik, yang mengatur bahwa diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

Hal tersebut sejalan dengan variabel teori politik pembangunan Warjio yang dimana sistem diperlukan dalam pembangunan, sebuah sistem yang dibentuk oleh pemerintah Kota Denpasar sebagai aktor politik pembangunan, dijalankan untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengembangkan Denpasar *Smart City*. Selain itu aplikasi Pro Denpasar memiliki keterkaitan dengan dinas-dinas dan bidang-bidang terkait. seluruh sistem dan mekanisme pengembangan Denpasar *Smart City* dijalankan untuk mencapai tujuan.

Pengembangan program ini sangat lambat bahkan tidak mengalami kemajuan. Pro Denpasar yang sudah jelas-jelas tidak berjalan efektif harusnya terus dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar bisa mencapai target yang ditentukan. Kominfo juga yang memiliki fungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik dapat mengajukan pertimbangan atau kebijakan lain sebagai pengganti Pro Denpasar ini apabila melihat ketidakefektifan kebijakan tersebut. Sehingga, tidak terjadi kevakuman dalam kebijakan yang malah merugikan masyarakat. Karena selama proses adanya pengaduan dari Pro Denpasar pun hanya digeluti oleh segelintir orang. Terlihat juga ketidakpuasan masyarakat

karena merasa pengaduan mereka tidak mendapatkan respon sebagaimana mestinya dari berbagai kolom komentar atau kolom pengaduan yang disediakan dalam aplikasi Pro Denpasar ini.

### **Analisis Aktor Politik Pembangunan**

Terdapat 3 variabel teori aktor politik pembangunan. Adapun variabel dalam teori aktor politik pembangunan Warjio yaitu: Negara sebagai aktor politik pembangunan, Swasta sebagai aktor politik pembangunan, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai aktor politik pembangunan.

### **Negara Sebagai Aktor Politik Pembangunan**

Negara sebagai aktor politik pembangunan berfungsi untuk memuluskan kebijakan program pembangunan ini, dalam hal ini adalah mengembangkan Denpasar *Smart City*. Untuk menjalankan program pembangunan tersebut biasanya menggerakkan apa yang disebut dengan birokrasi. Walikota Denpasar bersama dengan jajaran birokrasi Pemkot Denpasar adalah aktor dalam politik pembangunan di Kota Denpasar.

Walikota bersama Wakil Walikota Denpasar sebagai aktor politik pembangunan memiliki ideologi dan cita-cita yaitu ingin mengembangkan Kota Denpasar sebagai kota *Smart City*. Rencana ini sudah disuarakan lewat kampanye Pilkada Kota Denpasar tahun

2010 silam. Atas kemenangan Rai Mantra, Pasangan terpilih saat itu memanfaatkan kekuasaannya untuk mengintervensi pembangunan. Walikota juga memanfaatkan kekuasaan sebagai aktor politik pembangunan yang memiliki kepentingan dengan membuat program-program *Smart City* dengan membangun sistem dalam hal ini dengan jajaran birokrasi yaitu dinas di jajaran Pemkot Denpasar. Hal tersebut selaras dengan variabel teori aktor politik pembangunan Warjio bahwa negara sebagai aktor dalam politik pembangunan.

Selain itu, masyarakat sebagai bagian dari negara memiliki peran yang sangat penting dari sebuah pembangunan. Pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan permasalahan kependudukannya. Suatu pembangunan dapat berhasil apabila dalam pembangunan tersebut didukung oleh subyek pembangunan, yaitu penduduk yang memiliki kualitas dan kuantitas memadai atau bisa disebut dengan kesadaran akan pembangunan itu sendiri. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan di daerah, mendorong masyarakat turut serta secara aktif dalam realisasikan berbagai kebijakan publik yang telah dirumuskan, partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek sangat dibutuhkan.

Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan wujud nyata dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 pasal di dalam UU ini yaitu pada pasal 2, 5,6, dan 7

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan perlu dipertimbangkan oleh Pemkot Denpasar Program yang dicanangkan tidak hanya sekedar program namun memiliki prospek yang baik dan menguntungkan berbagai kalangan. Khususnya dalam kasus ini adalah Pro Denpasar yang diciptakan sebagai saranamengajakana spirasi masyarakat yang sebenarnya di lapangan mempermudah masyarakat pun mempermudah pemerintah untuk dapat melihat kondisi daerahnya dengan baik

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan lewat wawancara dengan narasumber yang sesuai dengan tupoksinya. Penulis menyimpulkan bahwa politik pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana maupun segala aspek yang

berkaitann dengan kesejahteraan masyarakat dengan memikirkan konsep menciptakan kebijakan atau strategi tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan untuk mencapai sasarannya. Dalam hal ini pembangunan politik yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Denpasar atas kebijakann Walikota Denpasar tahun 2013-2020, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra beserta jajaran birokrasi Pemkot Denpasar, sebagai aktor yang memiliki kekuasaan dalam membuat sebuah rancangan kebijakan *Smart City*. Walikota beserta jajaran birokrasi Pemkot Denpasar kurang baik dalam memaksimalkan politik pembangunan, dan kurang baik dalam memainkan peranan sebagai aktor politik pembangunan dilihat dari permasalahan-permasalahan.

Mengenai aplikasi Pro Denpasar sebagai wujud dari pengembangan konsep Kota Denpasar sebagai kota pintar, dari hasil wawancara yang sudah didapat di lapangan disimpulkan bahwa kebijakan ini dapat dikategorikan belum berhasil karena tidak sejalan dengan tujuan Pro Denpasar tersebut pada awalnya. Masih kurang maksimal dari kebijakan ini. Dalam hal mensosialisasikan aplikasi ini pun tergolong kurang baik, karena mayoritas masyarakat awamm tidak mengenal aplikasi ini dan masyarakat kurang peduli akan aplikasi ini, sehingga rendahnya partisipasi masyarakat. Pemerintah sebagai pelopor kebijakan ini

pun tidak menanggulangi hal tersebut atau terkesan dilakukan pembiaran sehingga minimnya pengetahuan tentang Pro Denpasar ini terus berlanjut hingga 5 (tahun) berjalan, sekalipun ada masyarakat yang mengetahui Pro Denpasar ini masyarakat cenderung skeptis dan beranggapan bahwa hal ini hanya sekedar formalitas. Hal tersebut terjadi disebabkan kurangnya *feedback* yang baik dilakukan oleh pemerintah setelah mendapatkan karena laporan yang diberikan oleh masyarakat melalui Pro Denpasar tersebut hanya diberikan respon sebatas saja dan kurangnya tinjauan lanjutan yang lebih realistis oleh dinas terkait.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dwiyanto Agus. 2017. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli Inklusif dan Kolaborasi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- McNair, Brian. *An Introduction To Political Communication* (London and New York: Routledge, 2003)
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal.36. Tersedia pada <http://digilib.uinsby.ac.id>. (diakses pada 20 Oktober 2019 pukul 21.45 WITA)
- Michael P. Todaro, 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan. Jilid 1, Erlangga, Jakarta. Tersedia

- pada <http://digilib.uinsby.ac.id>.  
(diakses pada 20 Oktober 2019  
pukul 20.48 WITA)
- Setiawan, Ferry. 2019. Kolaborasi yang  
Dilaksanakan di Kawasan Wisata  
Dermaga Kereng Bangkirai Kota  
Palangka Raya, Jurnal  
Administrasi, Vol. 10 No 2.
- Warjio. 2013. *Dilema Politik Pembangunan  
PKS: Islam dan Konvensional*.  
Medan: Perdana Publishing
- Warjio. 2016. *Politik Pembangunan  
Paradoks, Teori, Aktor, dan  
Ideologi*. Jakarta: Kencana.
- Artikel Jurnal:**
- Allwinkle, Sam & Cruickshank (2011).  
*Creating Smart-er Cities: An  
Overview. Journal of Urban  
Technology*. Vol. 18 NO.2 April  
2011, 1-16 Routledge
- Gandarum, D. N. (2016). Inquiry Paradigm  
For Understanding Livable Urban  
Space  
In Local Knowledge Framework. *Pro  
siding Seminar Kota Layak Huni/ Liva  
ble Space* (2016: Applying Local  
Knowledge for Livable Space).
- Lestari, Bandiyah & Wiwin (2014).  
PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS  
E-GOVERNMENT.
- Mantra, I. B. R. D. (2014). Membangun  
Monumen Maya Menggerakkan  
Partisipasi Menuju Denpasar  
Sejahtera. Paper presented at the  
Seminar Nasional HUT Kota  
Denpasar Ke-226 Representasi  
Sinergi Budaya, Kreativitas, dan  
Pendidikan Menuju Kesejahteraan  
Berkelanjutan, Kota Denpasar.
- Nam, Taewoo ; & Pardo, Theresa A.  
(2011). "Conceptualizing Smart  
city with Dimensions of  
Technology, People, and  
Institutions", *The Proceedings  
of the 12th Annual  
International Conference  
on Digital  
Government Research*.
- Ratnasari, Puput. (2020). *POLITIK  
PEMBANGUNAN DI KOTA  
PALANGKA RAYA MENUJU  
SMART CITY KOTA PALANGKA  
RAYA*. Volume 6 No. 1 Februari  
2020
- Risnandarmal. (2014). Analisis *E-  
government* dalam Peningkatan  
Pelayanan Publik pada Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Sulawesi Tengah. *E-  
Jurnal Katalogis*, 2 No.7,
- Sucitawathi, Joniarta, Dewi. (2018). Konsep  
"Smart City" Dan Tata Kelola  
Pemerintahan Di Kota Denpasar.  
*Public Inspiration: Jurnal  
Administrasi Publik*. Volume 3 No  
1, 2018
- Internet :**
- Antara News.com, PRO Denpasar  
Minimalkan Pengaduan  
Masyarakat. [Tersedia Pada  
https://bali.antaranews.com/berita/1  
35165/pro-denpasar-minimalkan-](https://bali.antaranews.com/berita/135165/pro-denpasar-minimalkan-)

- [pengaduan-masyarakat](#) (diakses pada 2 Januari 2021 pada pukul 21.56 WITA)
- Bappenas.go.id, PEMBANGUNAN POLITIK. Tersedia pada (<https://www.bappenas.go.id/files/3913/5078/6546/bab-v-pembangunan-politik.pdf>, diakses pada tanggal 19 November 2020 pada Pukul 12:19 WITA)
- DenpasarKota.go.id, Pro Denpasar Efektif Minimalisir Pengaduan di Kota Denpasar, 2019. Tersedia pada <https://www.denpasarkota.go.id/berita/baca/14368> (diakses pada 3 Januari 2021 pada pukul 19.06 WITA)
- Inet. Detik.com, 2017. Indonesia dan Pemerintahan Digital. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3416696/indonesia-dan-konsep-pemerintahan-digital> (diakses pada 29 Desember 2020 pada pukul 21.26 WIB)
- Kompas.com, 2015. Bandung Terpilih Menjadi Finalis World Smart City Awards 2015. Tersedia pada <https://properti.kompas.com/read/2015/11/18/071441521/Bandung.Terpilih.Menjadi.Finalis.World.Smart.City.Awards.2015> . (diakses pada 2 Januari 2021 pada pukul 21.56 WITA)
- Kominfo.com. Tugas dan Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tersedia pada <https://www.kominfo.go.id/tugas-dan-fungsi>. Diakses pada 23 Februari 2021. pada pukul 21.45 WITA)
- KotaDenpasarBPS.go.id, Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015. Tersedia pada <https://denpasarkota.bps.go.id/statistik/2015/09/17/21/penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kota-denpasar-tahun-2010---2015.html> (diakses pada 28 Desember 2020 pada pukul 15.34 WITA)
- PenaBali.com, 2019. Aplikasi PRO Denpasar Jadi SuperApps, Layanan dalam Satu Genggaman <https://penabali.com/bali/denpasar/aplikasi-pro-denpasar-jadi-superapps-layanan-dalam-satu-genggaman/> (diakses pada 25 Januari 2021 pada pukul 10.45 WITA)
- SocialDaily.id, 2020. Mewujudkan Pemerintahan Digital yang Ideal. Tersedia Pada <https://dailysocial.id/post/pemerintahan-digital-yang-ideal-nzte> (diakses pada 2 Januari 2021 pada pukul 21.56 WITA)

#### **Sumber Perundang – undangan :**

- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik
- Undang-Undang No25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kota Denpasar